



Article Informations
Corresponding Email:
fentynurhayati99@gmail.com

Received: 24/07/2025; Accepted:
25/08/2025; Published: 15/10/2025

PERAN SIDA (THE SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COORPERATION AGENCY) DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI BANGLADESH TAHUN 2016-2020

Fenty Nurhayati

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency) dalam mewujudkan kesetaraan gender di Bangladesh pada tahun 2016–2020. Permasalahan ketimpangan gender yang bersifat struktural dan kultural di Bangladesh menjadi tantangan besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengidentifikasi kontribusi SIDA sebagai organisasi internasional dalam mendukung kebijakan dan program pemberdayaan perempuan. Penelitian menemukan bahwa SIDA menjalankan peran dalam tiga dimensi utama: sebagai instrumen; arena kerja sama; sebagai aktor independen. Strategi yang digunakan SIDA bersifat partisipatif, berbasis hak, dan sensitif terhadap konteks lokal. Temuan menunjukkan bahwa inisiatif SIDA berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi perempuan, reformasi institusi nasional, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Kata Kunci: SIDA, kesetaraan gender, Bangladesh, organisasi internasional, liberalisme institusional

Abstract

This study aims to analyze the role of SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency) in promoting gender equality in Bangladesh during 2016–2020. Structural and cultural gender disparities remain major challenges in the country's socio-economic development. Using a qualitative approach and descriptive-analytical method, this research identifies SIDA's contributions as an international organization in supporting gender empowerment policies and programs. The findings reveal that SIDA operates in three main dimensions: as an instrument; as a platform for cooperation; and as an independent actor. SIDA's strategies are participatory, rights-based, and context-sensitive. Its initiatives contributed to increased female participation, national institutional reform, and civil society capacity building.

Keywords: SIDA, gender equality, Bangladesh, international organization, institutional liberalism

1. PENDAHULUAN

Bangladesh yang dulu adalah Pakistan merupakan salah satu bagian dari negara yang ada di Asia Selatan dan juga sebelumnya merupakan bagian dari India, akan tetapi memisahkan diri di tahun 1947 karena ingin membentuk negara yang berdasarkan pada agama Islam sehingga mendirikan pemerintahannya sendiri. Menjadi salah satu negara yang berkembang, Bangladesh memiliki keinginan untuk tetap menjaga stabilitas negara dengan memperhatikan berbagai aspek. Pembangunan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bangladesh untuk mempertahankan stabilitas negara, pembangunan ekonomi maupun sosial dapat menjadi pondasi untuk menjaga stabilitas negara.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per-kapita ril penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pembangunan sosial merupakan konsep yang merujuk pada suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sejalan dengan proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi di Bangladesh sendiri sebagai negara berkembang tentunya menghadapi berbagai macam tantangan seperti pembangunan manusia masih kurang diperhatikan oleh Bangladesh, yang mana dapat terlihat dengan masih banyaknya kekurangan dari berbagai aspek baik dari segi pendidikan, kesehatan dan juga masih tingginya angka diskriminasi.

Amartya Sen, seorang ekonom membahas tentang pentingnya gender equality dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Dalam bukunya, *Development as Freedom* (1999), Sen menekankan bahwa kesetaraan gender adalah aspek penting dari kebebasan manusia dan kemajuan sosial. Dia menyatakan: "Gender inequality is not only a problem of social justice but also a major hindrance to development." Ketidaksetaraan gender menghambat perkembangan sosial dengan membatasi partisipasi dan produktivitas ekonomi. Perbedaan pendidikan, khususnya untuk perempuan, membatasi pengembangan keterampilan dan memperpetuasi siklus kemiskinan.

Bangladesh memiliki keinginan untuk memberlakukan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan juga kebebasan. Hal ini sejalan dengan napa yang dituangkan Bangladesh dalam *The Constitution of The Republic of Bangladesh* artikel 28, yang menyatakan “*The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth, and Women shall have equal rights with men in all sphere of the State and of public life*”.

Dengan memiliki regulasi yang cukup jelas, Bangladesh memiliki tekad yang kuat untuk menegakkan keadilan gender. Akan tetapi, secara praktis apa yang dilakukan oleh Bangladesh dengan mengeluarkan beberapa kebijakan hanya dapat memberikan dampak kecil bagi kesetaraan gender di Bangladesh itu sendiri. Hal itu terjadi dikarenakan pemerintah Bangladesh sendiri masih kurang dapat berkomitmen sehingga dalam penerapan kebijakan tersebut kurang efektif dan menyebabkan kesetaraan gender sulit untuk diraih.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan termasuk kedalam instrumen internasional yang dijadikan acuan oleh negara-negara untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Adanya deklarasi dan juga konvensi tersebut membuat konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan antara laki laki dan perempuan, sehingga perempuan dan laki laki memiliki hak dan kesempatan yang sama baik dalam segi politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya. Serta kesetaraan gender merupakan konsep agar tidak adanya penolakan akses dan juga perampasan atas hak hak yang disebutkan sebelumnya yang berdasar pada jenis kelamin.

Penyebab permasalahan gender di Bangladesh diantaranya adalah budaya keluarga dan nilai-nilai agama seperti patriarki dan patrilineal. Masyarakat yang didominasi patriarki agama menyebabkan perempuan di Bangladesh tidak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan. Sebagai contoh, dalam agama Hindu Ortodoks seorang anak perempuan tidak memiliki hak atas properti ayah mereka. Sedangkan dalam Islam, seorang janda hanya mendapat 12,5% properti dari suaminya di bawah

hukum syariah. Namun, dalam prakteknya janda bahkan tidak mendapatkan apapun akibat hukum adat dan fatwa politik desa.

Sebagai bagian dari bantuan pembangunannya, Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia (SIDA) menawarkan Program Pelatihan yang secara strategis berfokus pada pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi bagi negara anggota. Program dalam Kerjasama SIDA dengan Bangladesh ini dirancang khusus untuk para profesional yang memegang posisi diorganisasi asal mereka dengan mandat untuk mendorong proses perubahan. Program pelatihan didasarkan pada asumsi bahwa organisasi ingin mendorong perubahan dan bersedia menginvestasikan sumber daya mereka sendiri dalam proses tersebut. Tujuan keseluruhan dari SIDA adalah untuk berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender di negara-negara peserta. Program ini memiliki tujuan pada tiga tingkat yang berbeda di mana perubahan harus terjadi.

Dengan melihat kondisi di Bangladesh maka SIDA memutuskan untuk turut membantu dalam peningkatan kesetaraan gender bagi warga negara Bangladesh. Sebagai Lembaga yang memiliki fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial maka SIDA melihat bahwa Bangladesh termasuk salah satu negara yang bisa untuk diberi bantuan serta jika dilihat dari urgensi sebagaimana tujuan dari SDG's maka Bangladesh termasuk kedalam negara yang memang harus dibantu dalam hal pembangunan negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis memutuskan untuk mengkaji peran SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency) dalam mewujudkan kesetaraan gender di Bangladesh tahun 2016-2020, dengan pembatasan masalah terkait pada kesetaraan gender di Bangladesh dan pembatasan waktu yakni tahun 2016-2020. Sehingga rumusan masalah untuk penelitian ini ialah “Bagaimana peran SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency) dalam mewujudkan kesetaraan gender di Bangladesh tahun 2016-2020?”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas dari implementasi atau penerapan kebijakan dalam negeri yang dilakukan

Bangladesh serta mengetahui efektivitas dari Program yang ditawarkan oleh SIDA pada tahun 2016 – 2020 di Bangladesh, yang diantaranya melalui:

1. Analisa identifikasi program-program utama yang dilaksanakan oleh SIDA di Bangladesh terkait kesetaraan gender selama periode 2016-2020;
2. Menganalisis efektivitas strategi dan pendekatan yang digunakan oleh SIDA dalam meningkatkan kesetaraan gender di Bangladesh;
3. Mengevaluasi dampak konkret dari program-program SIDA terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik perempuan di Bangladesh dalam kurun waktu tersebut.;
4. Mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh SIDA dalam upaya mencapai kesetaraan gender di Bangladesh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena mengenai apa yang dirasakan. Dengan menggunakan menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis dipilih dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi kemudian menganalisisnya secara mendalam, dimana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

2. PEMBAHASAN

KESETARAAN GENDER DI BANGLADESH

Kesetaraan gender adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama di semua bidang kehidupan, baik dalam konteks keluarga, komunitas, maupun negara. Menurut UN Women, kesetaraan gender tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus menjadi sama, tetapi bahwa hak-hak mereka tidak boleh ditentukan oleh perbedaan gender. Kesetaraan ini mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta representasi politik dan sosial.

Secara teoritis, konsep ini memiliki beberapa pendekatan. Sylvia Walby menyebut kesetaraan gender sebagai kondisi ideal ketika hubungan sosial

antara laki-laki dan perempuan tidak lagi berbasis pada dominasi dan subordinasi. Martha Nussbaum, melalui pendekatan Capabilities Approach, berpendapat bahwa kesetaraan sejati dapat dicapai jika perempuan memiliki kemampuan dasar seperti hidup sehat, memiliki pendidikan, partisipasi dalam politik, serta kebebasan memilih jalan hidupnya. Dalam bukunya *Development as Freedom*, Amartya Sen menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya merupakan bentuk ketidakadilan, tetapi juga penghambat utama pembangunan manusia.

Kesetaraan gender di Bangladesh telah menjadi isu yang mendapat perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional selama dua dekade terakhir. Negara ini telah mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang signifikan, namun masih menghadapi tantangan mendalam dalam mewujudkan kesetaraan yang menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Bangladesh memiliki sejarah panjang terkait subordinasi perempuan yang diperkuat oleh budaya patriarki, nilai agama konservatif, dan struktur sosial yang hierarkis. Dalam masyarakat Bangladesh, peran gender secara tradisional dibagi secara tegas—laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan pemegang keputusan, sedangkan perempuan ditempatkan di ruang domestik dan diharapkan menjalankan peran sebagai istri, ibu, dan pengurus rumah tangga.

THE SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY (SIDA)

The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) merupakan lembaga resmi pemerintah Swedia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pembangunan internasional Swedia. Didirikan pada tahun 1965, SIDA beroperasi di bawah Kementerian Luar Negeri Swedia dan memainkan peran kunci dalam menyalurkan bantuan pembangunan, mengurangi kemiskinan, serta mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan gender di negara-negara berkembang, termasuk Bangladesh.

Pendirian dan pelaksanaan mandat SIDA didasarkan pada sejumlah regulasi nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Swedia Nomor 2007:1371 (*Förordning 2007:1371*) tentang tugas dan tanggung jawab lembaga pembangunan internasional. Selain itu, SIDA juga bekerja dalam

kerangka kebijakan pembangunan global yang ditetapkan dalam Swedish Development Cooperation Policy dan kebijakan anggaran pembangunan resmi Swedia (Official Development Assistance/ODA) yang ditentukan oleh Parlemen Swedia (Riksdag) .

Dalam konteks Bangladesh, SIDA memiliki sejarah panjang dalam mendukung berbagai inisiatif pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta promosi inklusi sosial bagi kelompok minoritas. Pendekatan yang diterapkan SIDA di Bangladesh juga berupaya untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam seluruh siklus proyek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan Agenda 2030 dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, SIDA tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan luar negeri Swedia dalam bidang pembangunan, tetapi juga merupakan aktor transnasional yang aktif dalam membentuk arsitektur pembangunan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Keterlibatan SIDA dalam hubungan internasional bersifat fleksibel dan kolaboratif, dengan fokus pada transfer pengetahuan, pendampingan teknis, dan reformasi institusional. Dalam konteks nilai, SIDA menjadi pelaksana utama dari Feminist Foreign Policy Swedia sejak tahun 2014, yang mengarusutamakan kesetaraan gender dalam seluruh kebijakan luar negeri Swedia, termasuk dalam pemberian bantuan pembangunan, diplomasi, dan kerja sama ekonomi.

Melalui mandatnya yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta pendekatan programatik yang berbasis pada hak dan inklusi sosial, SIDA tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan luar negeri Swedia, tetapi juga sebagai aktor normatif dalam sistem pembangunan global.

Dalam kerangka kerja sama pembangunan global, SIDA menjalankan beberapa kegiatan utama sebagai berikut :

1. Mendukung Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Promosi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial
4. Respons Kemanusiaan dan Bantuan Darurat

5. Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan
6. Investasi pada Pendidikan dan Inovasi

Dalam menjalankan kerja sama pembangunan internasional, SIDA menerapkan strategi yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berbasis pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kerja sama antara SIDA dan Pemerintah Bangladesh telah berlangsung selama lebih dari dua dekade dan berfokus pada isu-isu utama pembangunan, terutama kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Secara umum, strategi kerja sama SIDA di Bangladesh dibangun atas dasar kemitraan jangka panjang yang menekankan pada kepemilikan lokal (local ownership), efektivitas pembangunan (development effectiveness), dan keberlanjutan program (sustainability). SIDA menghindari pendekatan dominatif dari negara donor dan lebih memilih membangun relasi kerja yang saling mendukung dengan institusi lokal.

Secara keseluruhan, pencapaian program-program SIDA di Bangladesh selama tahun 2016–2020 mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan berbasis hak (rights-based development) yang menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan semata objek penerima manfaat. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kerja sama internasional, jika dirancang dan diimplementasikan dengan sensitif terhadap konteks lokal dan berorientasi pada keadilan sosial, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi ketimpangan gender yang bersifat struktural. Dengan demikian, kontribusi SIDA di Bangladesh tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga politis dan transformasional dalam membentuk tatanan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender.

ANALISA PERAN SIDA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI BANGLADESH

Upaya pemerintah Bangladesh dalam mempromosikan kesetaraan gender telah tertuang dalam berbagai kebijakan nasional, seperti National Women Development Policy (NWDP) 2011 dan 7th Five Year Plan (2016–2020) yang memasukkan isu gender ke dalam agenda lintas sektor. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, koordinasi lintas lembaga, serta pemantauan berbasis data

yang terpilah gender. Dalam konteks inilah, peran organisasi internasional seperti Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) menjadi penting dalam mengisi kesenjangan kapasitas negara melalui dukungan teknis, keuangan, dan advokasi normatif untuk mendorong reformasi kelembagaan dan perubahan sosial yang lebih inklusif dan setara gender.

Dalam memahami peran Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) dalam mendorong kesetaraan gender di Bangladesh, perlu digunakan pendekatan teoretis yang memadai untuk mengkaji dinamika kerja sama internasional dan kontribusi aktor non-negara. Teori Liberalisme Institusional menjadi relevan karena melihat bahwa kerja sama antarnegara dan antaraktor dapat terwujud meskipun sistem internasional bersifat anarkis. Teori ini meyakini bahwa melalui institusi atau organisasi internasional, negara-negara dan entitas lainnya dapat menciptakan mekanisme kerja sama yang stabil dan menguntungkan secara bersama. Institusi semacam SIDA diyakini mampu mengurangi ketidakpastian, menciptakan transparansi, memperkuat komitmen, serta membentuk norma-norma bersama yang dapat mendorong stabilitas dan kemajuan global, termasuk dalam isu kesetaraan gender.

Teori Liberalisme Institusional menekankan bahwa kerja sama antarnegara dan antaraktor non-negara diperlukan untuk mengatasi masalah global yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Dalam konteks ini, SIDA berperan sebagai instrumen kerja sama internasional yang menawarkan pendekatan multilateral, non-koersif, dan berbasis nilai dalam menghadapi isu ketimpangan gender di Bangladesh. SIDA mengimplementasikan program-program yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mendukung inisiatif lokal, memperkuat kapasitas institusi nasional, dan mendorong partisipasi masyarakat sipil. Hal ini mencerminkan prinsip interdependence yang menjadi ciri utama teori ini. Salah satu contoh nyata adalah dukungan SIDA terhadap penerapan Gender Budgeting di beberapa kementerian Bangladesh, yang merupakan wujud konkret dari transfer nilai dan praktik internasional ke dalam kebijakan domestik. SIDA juga menunjukkan compliance management yang tinggi, yaitu melalui

pengawasan ketat terhadap prinsip kesetaraan dalam proyek-proyek yang mereka danai. Dalam kerangka Liberalisme Institusional, hal ini memperkuat asumsi bahwa institusi internasional mampu mengubah perilaku negara mitra melalui insentif, aliansi, dan pembentukan norma .

3. KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa SIDA (The Swedish International Development Cooperation Agency) memainkan peran signifikan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Bangladesh pada periode 2016–2020. Peran ini tercermin melalui tiga dimensi utama sebagaimana dijelaskan oleh Clive Archer, yakni SIDA sebagai instrumen, arena kerja sama internasional, dan aktor independen dalam sistem internasional. Sebagai instrumen, SIDA berperan dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan Bangladesh melalui bantuan teknis, finansial, dan advokasi terhadap program-program berbasis gender. Sebagai arena kerja sama internasional, SIDA menciptakan ruang diskusi dan kolaborasi antara aktor lokal dan internasional, seperti pemerintah Bangladesh, lembaga statistik nasional, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas perempuan.

Inisiatif seperti lokakarya, pelatihan berbasis gender, hingga penyusunan data terpilah gender merupakan bentuk nyata fungsi deliberatif SIDA dalam membangun kapasitas nasional yang inklusif dan responsif terhadap isu gender. Sebagai aktor independen, SIDA juga menunjukkan kemampuan dalam mempromosikan dan menyebarluaskan norma-norma global terkait kesetaraan gender. Dari keempat fungsi organisasi internasional menurut Archer—fungsi agregasi, normatif, informasi, dan operasional—SIDA telah menunjukkan konsistensi dan efektivitasnya dalam mendukung transformasi sosial yang berbasis pada prinsip kesetaraan gender.

Peran SIDA juga tidak dapat dilepaskan dari konteks rezim internasional seperti Beijing Platform for Action, Agenda 2030, dan OECD-DAC Gender Equality Marker, yang menjadi acuan global dalam agenda kesetaraan gender. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SIDA secara holistik telah memenuhi peran dan fungsinya sebagai organisasi

internasional dalam membantu Bangladesh menciptakan tatanan sosial yang lebih setara dan berkelanjutan bagi perempuan dan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulihadi, A. (2018). Sejarah Lahirnya Negara Bangladesh. *Jurnal Kajian*
- Hasan, M., Hartoto, A., & Riyaldi, M. H. (2022). *EKONOMI PEMBANGUNAN: Sebuah Tinjauan dan Praktis*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Winarno, B. (2011). *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- Khan, M. H. (2005). *BANGLADESH HUMAN SECURITY ASSESSMENT. CORE* Vol. 4, 1-58. Retrieved from https://core.ac.uk/outputs/2792189/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Amartya Sen, A. D. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press. Retrieved from <http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/OMDE625/Sen/Sen-intro.pdf>
- Government of the People's Republic of Bangladesh. (2019). *The Constitution of The People's Republic of Bangladesh*. Retrieved from *Fundamental Rights*: <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/section-24576.html#:~:text=The%20Constitution%20of%20the%20People%2080%8C%E2%80%8C%E2%80%8D's%20Republic%20of%20Bangladesh,-Part%20III&text=FUNDAMENTAL%20RIGHTS-,Discrimination%20on%20grounds%20of%20religion%2C%20etc.,>
- Rouf, K. A. (2013). Religious Patriarchal Values Obstruct Bangladeshi Rural Women's Human Rights. *Journal Research in Peace. Gender and Development (RJPGD)*. Vol. 3. No. 5, 65-81.
- Hossain, & Rahman. (2020). The Impact of International Training Programmes on Public Sector Capacity in Bangladesh: Insights from Sida's ITP. *International Journal of Public Administration*, 26-39.
- UN Women. (2020). *Gender Equality: Glossary of Terms and Concepts*. Retrieved from *N Women Training Centre*: <https://trainingcentre.unwomen.org>
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.

- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Rouf, K. A. (2013). *Practicing Gender Equality in Bangladesh: The Role of NGOs*. Toronto: York Centre for Asian Research.
- Government of Sweden. (2007). *Förordning (2007:1371) om instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)*. Stockholm: Regeringskansliet.
- Swedish Ministry for Foreign Affairs. (2016). *Policy Framework for Swedish Development Cooperation and Humanitarian Assistance*. Stockholm: Ministry for Foreign Affairs.
- SIDA. (2020). *Bangladesh Annual Results Report 2019*. Stockholm: Swedish International Development Cooperation Agency.
- Mawdsley, E. (2018). *International Development: Progress, Problems and Prospects*. London: Palgrave Mcmillan.
- Mukhopadhyay, Maitrayee, & Meer, S. (2004). *Creating Voice and Carving Space: Redefining Governance from a Gender Perspective*. *IDS Bulletin*, Vol. 35, No. 4, 1-9.